

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA ASN PADA BAGIAN BIRO HUMAS PROTOKOLER
DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

NURRIJALIANA
NIM.11675201750


**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: NURRIJALIANA
 : 11675201750
 : ADMINISTRASI NEGARA
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP
 KINERJA ASN PADA BAGIAN BIRO HUMAS PROTOKOLER DI KANTOR
 GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**


Drs. H. Almasri M.Si
NIP. 196708012005071007

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamarruddin, S. Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan kegiatan akademik.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Nurrijaliana
 NIM : 11675201750
 PRODI : Ilmu Administrasi Negara
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 JUDUL : Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Kinerja ASN Pada Bagian Biro Humas Protokoler Di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
 TANGGAL UJIAN : 28 Desember 2020

Disetujui Oleh:

Ketua Penguji

Fakhrurrozi,SE,MM
NIP. 196707252000031002

Mengetahui,

Dr. Jhon Afrizal,S.H.I. MA
NIP. 197909112011011003

Penguji II

Afrinaldy Bustam,S.IP. M.Si
NIP. 197404202014111001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ASN PADA BAGIAN BIRO HUMAS PROTOKOLER DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh:

Nurrijaliana

11675201750

Biro Humas dan Protokoler kantor gubernur kepulauan riau adalah salah satu mitra pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kinerja ASN. Good Governance (X) adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi. Kinerja ASN (Y) adalah hasil dari kegiatan kerjasama diantara para ASN dalam rangka mewujudkan tujuan instansi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dengan analisa kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan analisa data yang diperoleh maka pelaksanaan good governance terhadap kinerja ASN sebesar 0,000. Berdasarkan uji koefisien determinasi maka diperoleh nilai sebesar 0,437, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja ASN sebesar 43,7%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja ASN.

Kata Kunci: *Good Governance, Kinerja ASN, Biro Humas Protokoler*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ASN PADA BAGIAN BIRO HUMAS PROTOKOLER KANTOR GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun material selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Rijal Hamdani dan Ibunda Noviar yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat dan untaian doa yang terus mengalir kepada peneliti sejak kecil hingga saat ini, serta memberikan dukungan penuh terhadap penulis dalam menyusun pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Drs. H. Muh Said HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhammad Rafi S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberikan saran dan arahan pada proses pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Almasri M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi serta dapat meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ketiga Saudara kandung penulis, Nur Shafiyatun Nada, Nur Annisa Ramadhani dan Nur Sya'bana Putra yang telah memberikan semangat beserta dukungan kepada penulis.
10. Sahabat terkasih Amirah Nuryasmin dan Dame Valentina Siahaan yang telah memberikan semangat dan waktunya kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Teman seperjuangan penulis, Lokal C Angkatan 2016 jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama untuk Tika, Nabila, Nurnia, Vinny, Shindy, dan Laili semangat serta pemikirannya kepada penulis.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang dapat penulis ucapkan.
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang penuh kebaikan dan kebenaran. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Penulis

Nurrijalana

NIM. 11675201750



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Good Governance	11
2.2 Kinerja	15
2.3 Aparatur Sipil Negara.....	19
2.4 Konsep Islam	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
2.6 Definisi dan Konsep	26
2.7 Kerangka Pemikiran	27
2.8 Variabel Penelitian	27
2.9 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.4 Populasi dan Sampel.....	31
3.5 Skala pengukuran data.....	31
3.6 Uji kualitas data.....	32
3.7 Uji asumsi klasik	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8 Uji agresi linear sederhana	33
3.9 Uji Hipotesis	34
3.10 Uji koefisien determinasi	34

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Provinsi Kepulauan Riau	35
4.2 Geografis Provinsi Kepulauan Riau	36
4.3 Sumber Daya Provinsi Kepulauan Riau	39
4.4 Profil Singkat Biro Humas Protokoler.....	40
4.5 Visi dan Misi Biro Humas Protokoler	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian.....	44
5.2 Karakteristik responden.....	44
5.3 Analisis Deskriptif Variabel	47
5.4 Pengujian kualitas data	66
5.5 Analisis data penelitian.....	68
5.6 Uji Asumsi klasik	70
5.7 Uji hipotesis.....	71
5.8 Pembahasan	73

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	78
6.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SKP Biro Humas Protokoler Tahun 2018	6
Tabel 1.2	Rekapitulasi Absensi ASN Tahun 2018.....	7
Tabel 3.1	Populasi Jumlah ASN.....	31
Tabel 3.2	Klasifikasi alat ukur	32
Tabel 5.1	Responden berdasarkan jenis kelamin	44
Tabel 5.2	Responden berdasarkan kelompok usia	45
Tabel 5.3	Responden berdasarkan pangkat golongan	46
Tabel 5.4	Distribusi Responden Menurut Lama Bekerja	46
Tabel 5.5	Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas yaitu mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang sebagai ASN di Biro Humas Protokoler Provinsi Kepulauan Riau	47
Tabel 5.6	Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas yaitu berinisiatif menyusun laporan akuntabilitas kerja di setiap akhir tahun.....	48
Tabel 5.7	Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas yaitu setiap tugas dan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dapat dipertanggung jawabkan.....	49
Tabel 5.8	Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas yaitu laporan instansi pemerintah wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah.....	50
Tabel 5.9	Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas yaitu sistem kinerja sudah berjalan dengan baik	51
Tabel 5.10	Tanggapan Responden tentang Transparansi yaitu sistem komunikasi organisasi di Biro Humas Protokoler sudah terbuka.....	51
Tabel 5.11	Tanggapan Responden tentang Transparansi yaitu menerapkan prinsip – prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Stateslami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.12	Tanggapan Responden tentang Transparansi yaitu Prinsip good governance harus dipenuhi demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan sehat.....	53
Tabel 5.13	Tanggapan Responden tentang Transparansi yaitu partisipasi masyarakat harus ada di setiap penyelenggara pemerintahan..	54
Tabel 5.14	Tanggapan Responden tentang aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat	55
Tabel 5.15	Tanggapan Responden tentang mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan	55
Tabel 5.16	Tanggapan Responden tentang aspirasi masyarakat sangatlah penting untuk didengar dan di tindak lanjuti.....	56
Tabel 5.17	Tanggapan Responden tentang berkembang dalam menciptakan perubahan kearah yang lebih baik	57
Tabel 5.18	Tanggapan Responden tentang menciptakan perubahan dari waktu ke waktu agar instansi menjadi lebih baik.....	58
Tabel 5.19	Tanggapan Responden tentang belajar dari kesalahan sebelumnya dan mengembangkan asprasi masing-masing pegawai.....	59
Tabel 5.20	Tanggapan Responden tentang mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus yang diminta secara mendadak	60
Tabel 5.21	Tanggapan Responden tentang pekerjaan yang diselesaikan selalu mencapai sasaran yang ditetapkan	60
Tabel 5.22	Tanggapan Responden tentang sering meminta bantuan kepada rekan kerja apabila tugas yang diberikan sulit	61
Tabel 5.23	Tanggapan Responden tentang mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari solusi terhadap tugas ataupun masalah pekerjaan yang sedang dihadapi.....	62
Tabel 5.25	Tanggapan Responden tentang selalu merasa senang dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan	63
Tabel 5.26	Tanggapan Responden tentang Pekerjaan /tugas yang diberikan atasan sudah sesuai dengan kemampuan.....	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.27	Tanggapan Responden tentang mampu bekerja secara profesional.....	64
Tabel 5.28	Tanggapan Responden tentang menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan sesuai deadline	65
Tabel 5.29	Hasil Uji Validitas	66
Tabel 5.30	Hasil Uji Realibilitas	68
Tabel 5.31	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana	68
Tabel 5.32	Hasil Uji Secara Parsial (Uji T).....	71
Tabel 5.33	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	73
Tabel 5.34	Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Biro Humas Protokoler	43
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas.....	70



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer baik di pemerintahan, civil society maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Di pemerintahan (*public governance*), tema ini begitu menyentuh. Banyak pihak yang “menunjuk hidung” bahwa masalah mendasar bangsa ini akan terselesaikan kalau birokrasi pemerintahnya sudah kembali ke jalan yang baik. Karenanya bagi aparatur pemerintah, *good governance* adalah kewajiban yang harus diwujudkan.

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah.

Aparatur yang baik adalah yang mampu memberi kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum masyarakat itu sendiri memintanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam keadaan seperti ini, hati nurani aparatur pemerintahan adalah hati nurani dari masyarakat itu sendiri. Aparatur pemerintah pusat maupun daerah harus mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik yaitu:

1. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani.
2. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaboratis dan dialogis.
3. Dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis.

Secara mendasar perubahan sikap aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sangat terkait dengan program-program penyempurnaan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan organisasi pelayanan masyarakat. Dengan demikian harus memberikan citra yang baik dengan kinerja yang baik pula.

Secara umum, aparatur merupakan perangkat pemerintah yang memiliki sistem aturan dan terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat Pusat atau Daerah. Aparatur secara sempit diartikan juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang gajinya dibebankan pada APBN dan APBD, dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu ketika aparaturnya telah memiliki pemahaman yang komprehensif dan dia memegang teguh prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten maka akan terwujud pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga mereka mampu bekerja dalam "super-tim" (kekuatan tim kerja) bukan "super-man" (kekuatan individu) karena sebagai negara yang sedang berkembang aparaturnya pemerintah di pemerintah daerah di Indonesia menganggap dirinya sebagai "yang serba tahu". Stereotip ini muncul ketika masyarakat akan mengurus perizinan misalnya, mereka tidak punya pilihan selain membuatnya di kantor pemerintah.

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi pemerintahan dalam suatu negara.

Good governance yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan). *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan sendiri. Hari ini konsep *good governance* untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraannya



dilatar belakangi oleh banyak faktor, salah satu faktornya yaitu adalah sistem yang masih buruk dalam pelaksanaan good governance sehingga belum terciptanya *good government*.

Sembilan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan hukum yaitu salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi yaitu adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan harus bertanggungjawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

9. Bervisi strategis yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Menurut UU NO 36 Tahun 2012 Biro Humas dan Protokoler kantor gubernur provinsi kepulauan riau adalah salah satu mitra pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi. Maka dalam rangka menciptakan *good governance* Biro Humas dan Protokoler Kantor Gubernur provinsi Kepulauan Riau harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas akan memperlihatkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu sendiri.

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN, maka ASN diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai.

Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.

Menurut PP tersebut, setiap pegawai wajib menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan dengan tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab maupun rincian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stuktur organisai dan Tata Kerja (SOTK).

Tabel 1.1
Sasaran Kerja Pegawai Biro Humas Protokoler Di Kantor Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau

No	Kegiatan Tugas Jabatan	Waktu	Biaya
1	Melaksanakan administrasi perijinan perjalanan di luar negeri bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan	12 bulan	-
2	Mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan	12 bulan	-
3	Melakukan perekaman, penyajian data dan mengatur keprotokoleran kegiatan pimpinan.	12 bulan	-
4	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekertariat daerah	12 bulan	-
5	Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan	12 bulan	-
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang kehumasan dan keprotokolan	12 bulan	-
7	Melaksanakan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya dibidang kehumasan dan keprotokolan	12 bulan	-

Sumber: Biro Humas Dan Protokoler Tahun 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Biro Humas dan Protokoler yang ditargetkan selama 12 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2018 yang didalamnya terdapat prinsip pelaksanaan *good governance* yaitu transparansi mencakup aspek aktivitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Biro Humas dan Protokoler, kemudian juga menjalankan prinsip *good governance* dalam hal daya tanggap yaitu proses yang dilakukan pada upaya untuk melayani pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Biro Humas dan Protokoler juga menjalankan prinsip pelaksanaan *good governance* yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi dalam hal ini semua aspek point dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masuk kedalam prinsip efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian, didapatkan data dari Biro Humas Protokoler yaitu data Absensi ASN sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Absensi Manual ASN Bagian Biro Humas Protokoler di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah ASN	Hari Kerja	Absen			Jumlah Absen
				A	I	S	
1	Januari	57	20	-	2	1	3
2	Februari	57	22	-	-	-	-
3	Maret	57	21	-	9	2	11
4	April	57	20	-	5	-	5
5	Mei	57	21	-	-	2	2
6	Juni	57	11	-	12	3	15
7	Juli	57	22	-	-	3	3
8	Agustus	57	21	-	-	2	2
9	September	200	24	-	2	-	2
10	Oktober	200	20	-	5	-	5
11	November	200	22	-	-	2	2
12	Desember	200	24	-	9	1	10

Sumber: Biro Humas Dan Protokoler Tahun 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keterangan : A: Alfa

I: Izin

S: Sakit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat absensi terbesar terjadi pada bulan Maret, Juni, dan Desember karena pada bulan-bulan tersebut bertepatan dengan hari besar keagamaan dan libur akhir tahun sehingga banyak pegawai/ASN yang mengambil cuti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja ASN pada bagian biro humas protokoler di kantor gubernur provinsi kepulauan riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja ASN pada bagian biro humas protokoler di kantor gubernur provinsi kepulauan riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti secara subjektif adalah sebagai satu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna.

2. Bagi objek penelitian sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik lagi.
3. Bagi mahasiswa atau mahasiswi lainnya sebagai khasanah ilmiah untuk penelitian lainnya.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai pengaruh pelaksanaan good governance terhadap kinerja ASN Pada Bagian Biro Humas Protokoler Di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
2. Penelitian ini dilakukan di Biro Humas Protokoler Di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi untuk yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori-teori tentang good governance dan kinerja ASN serta hubungan antara keduanya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal meliputi: lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini dikemukakan tentang sejarah singkat Provinsi Kepulauan Riau, Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Struktur pegawai/ASN Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah, yang terdiri dari Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja ASN pada bagian biro humas protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diambil berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Good Governance*

Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2001, 18) konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Menurut Kooiman (Setyawan, 2004:224) mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Good governance menurut (Mardiasmo, 1998:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang berorientasi kepada oleh pemerintah yang baik. Menurut UNDP (United nation development program) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi
2. Setiap orang harus memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan keputusan dan aspirasinya masing-masing.
3. Aturan Hukum (Rule Of Law)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

4. Keadilan harus ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama tentang hak asasi manusia
5. Transparansi
6. Daya Tangkap (Responsive)
7. Berorientasi konsesus sebagai penengah atau mediator.
8. Berkeadilan (Equality)
9. Efektivitas dan Efisiensi
10. Akuntabilitas
11. Bervisi Strategis
12. Saling keterkaitan

Prinsip-prinsip diatas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan control dan pengendalian pemerintah yang baik.

Winarno (2002:53) menyebutkan sebenarnya *good governance* berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata prinsipnya adalah implementasi, sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar benar bermanfaat bagi masyarakat.

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *good governance* telah diterjemahkan menjadi



penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Nuryanto.A.Daim 2014:43).

Dalam pengertiannya istilah *governance* tidak sama dengan *government*.

Ganie Rochman mengemukakan bahwa konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara.

Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis mendefinisikan *governance* sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebgaiian urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejatraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Lebih lanjut UNDP berpendapat *governance* adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang complex melalui warga negara (*citizens*) dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Lembaga Administrasi Negara mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public good and service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi functional aspect, governace dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Good dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara sektor swasta dan masyarakat. Insititusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan member peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2. Kinerja

Kinerja merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *Degree of Accomplishment*. Hal ini berarti kinerja itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana bisa dapat mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kumorotomo (2009:36) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan public, antara lain adalah:

1. Efisiensi
2. Efektivitas
3. Keadilan
4. Daya tanggap

Kinerja juga bisa dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”* yaitu prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas



pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Dessler (2009) berpendapat : Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif; dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi (Gomes, 2003).

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian (2002) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis.

Pengukuran kinerja menurut Simamora (2004:50) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Dharma (2004:355) pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat menyediakan suatu sarana untuk menilai kinerja karyawan dan hasil penilaian dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji/upah, penguasaan lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan karyawan dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajemen kinerja pekerja atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan kinerja dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja pegawai yang telah dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara individu maupun kelompok.

Kinerja (*performance*) merupakan perilaku organisasional yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Kinerja seringkali difikirkan sebagai pencapaian tugas, dimana istilah tugas sendiri berasal dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan oleh pekerja (Gibson, 1997). Yukl (1998) memakai istilah *proficiency* yang mengandung arti yang lebih luas. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasil nyata atau *outcomes* yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral kerja. Gibson (1997) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti, kualitas, efisiensi, dan kriteria efektifitas lainnya. Kinerja merefleksikan seberapa baik dan seberapa tepat seorang individu memenuhi permintaan pekerjaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, kinerja dipandang sebagai hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi dipengaruhi oleh tingkat kinerja pegawai secara individu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kelompok, dimana kinerja diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergantung dengan ukuran kinerja secara umum, kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar yang dapat meliputi berbagai hal yaitu: kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pendapat atau pernyataan yang disampaikan, keputusan yang diambil dalam melakukan pekerjaan dan deskripsi pekerjaan.

Untuk mengukur kinerja secara individual, McKenna dan Beech (1995) ada beberapa indikator, indikator-indikator dari kinerja yang sering dipergunakan untuk menilai kinerja individu pegawai menurut McKenna dan Beech adalah: Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pada pekerjaan/kompeten Sikap kerja, diekspresikan sebagai antusiasme, komitmen dan motivasi Kualitas pekerjaan Interaksi, misalnya keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dalam satu tim. Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan.

2.3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembimbing kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai negeri sipil yang disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti ‘orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan ‘Negeri’ berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaiandan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. nilai dasar;
2. kode etik dan kode perilaku;
3. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. kualifikasi akademik;

Lembaga pemerintahan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam melayani masyarakat aparatur dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik yakni kinerjanya harus tinggi. Tercapainya kinerja bukan ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai akan tetapi juga dipengaruhi oleh factor lain seperti pengelolaan, pengendalian yang baik yang disebut *good governance*.

2.4. Konsep Islam tentang *Good Governance*

Melihat konsep *good governance* seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi public, maka dapat kita lihat relevansinya dalam hal tema yang dipakai dalam literature islam. Nabi Muhammad SAW umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu hadist Nabi Muhammad SAW yang sangat populer adalah: “Apabila berbicara selalu penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercaya selalu berkhianat.” Lebih

jauh lagi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepemimpinan yaitu shidiq, itiqomah, fathanah, amanah dan tabligh.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada 3 pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pada tatanan praktis sebagai bentuk interaksi social politik dalam proses pemerintah yang lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٤﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا تَجْرِمْتُمْ سِنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Satearahmanah Al-Hafidz Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-maidah ayat 1-2)*

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya.

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan



pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

Prinsip-prinsip di atas seharusnya ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan asas keadilan untuk sesama. Pada saat yang sama, ini juga disertai pemihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat dalam segala bentuk kebijaksanaannya.

Good governance ini semestinya dimulai dengan aktivitas saling berbagi informasi, keahlian dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan aktor kebijakan dalam proses kebijakan tersebut lebih mendekati keinginan dan kepentingan bersama, saatnya memaknai silaturahmi diantara elemen negara, sehingga pengelolaan negara tidak terjadi tumpang tindih dan tidak berorientasi pada keuntungan sekelompok masyarakat tapi mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat UUD 1945. Silaturahmi sesuai sabda nabi akan member efek kemakmuran dan mengantarkan pada kejayaan mekanisme silaturahmi yang baik akan melahirkan proses musyawarah yang efektif dan berujung pada keputusan yang berlandaskan konsesus bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ria Isdiana/2014/Skripsi	Analisis Kinerja Birokrasi Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi dengan kinerja pegawai.
2	Risal Rumlolas/2018/Skripsi	Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dilihat dari beberapa factor yaitu individual berupa keahlian yang cukup baik. Meskipun begitu, disiplin belum tercapai oleh beberapa oknum.
3	Khaerennisa/2016/Skripsi	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.	Berdasarkan penelitian pelaksanaan Good Governance berjalan dengan efektif dan optimal.
4	Nining Ade Ningsih/2017/Skripsi	Analisis hubungan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pegawai belum cukup efektif dan optimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Thomas S. Khaitu/2006/Jurnal	Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance dalam penerapannya di indonesia sudah dilaksanakan secara optimal.
6	Nur Azlina/2014/Jurnal	Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di kabupaten pelalawan.

2.6. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dari definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun,2006:33) adapun batasan definisi konsep tersebut adalah:

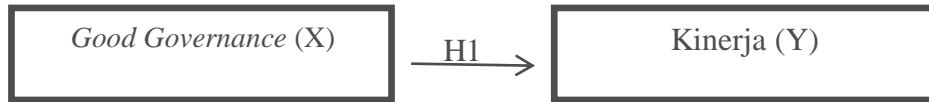
1. *Good governance* menurut Mardiasmo adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor public oleh pemerintah yang baik.
2. Kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*.
3. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Kerangka Pemikiran Peneliti

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji berikut ini:



Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen dalam hal ini adalah pengaruh pelaksanaan *good governance* (X) terhadap variabel dependen yaitu Kinerja ASN (Y) Pada Biro Humas Protokoler di kantor gubernur provinsi kepulauan riau.

2.8. Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel penelitian dari pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja atasan pegawai (ASN) adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<i>Good Governance</i> (X) "Suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama."	Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Pencapaian dalam melaksanakan <i>Good Governance</i> <i>Accountability</i> (pertanggungjawaban publik) <i>Transprancy</i> (kebebasan memperoleh informasi) <i>Responsiveness</i> (cepat dan tanggap) <i>Efficiency and effectiveness</i> (efisiensi dan efektivitas) <i>Strategic vision</i> (adanya visi ke depan)
Kinerja (Y) "Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya"	Hasil Kerja	Kesadaran dan tanggung jawab pada tugas Ketepatan dan Waktu Komitmen Kerja Efektivitas



2.9. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari data-data yang ada maka penulis membuat suatu hipotesis yaitu:

1. H1 : Diduga bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja ASN pada bagian biro humas protokoler di kantor gubernur provinsi kepulauan riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja ASN pada bagian biro humas protokoler di kantor gubernur provinsi kepulauan riau yang terletak di jalan kompleks perkantoran gubernur gedung a, dampak, tanjungpinang, provinsi kepulauan riau. Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. **Sugiyono (2016:6).**

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring. Sugiyono (2016:6).

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan menyebarkan angket atau kuesioner.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui data yang dimiliki instansi seperti SKP, Absensi, media internet serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Kuisisioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. (Sugiyono, 2016: 142). Adapun angket yang disusun sesuai dengan indikator penelitian yaitu tentang pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja ASN pada bagian biro humas protokoler di kantor gubernur provinsi kepulauan riau.

2. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunya ciri spesifik bila di badingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2016: 145).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2007:90) menjelaskan mengenai pengertian populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi sasaran populasi adalah ASN bagian Biro Humas Protokoler pada kantor gubernur provinsi kepulauan riau yang terdiri dari 57 orang.

Tabel 3.1
Populasi Jumlah ASN Biro Humas Protokoler Pada Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

No	Jumlah ASN	Sampel
1	57	57

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91). Jumlah pegawai ASN Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 57 pegawai. Apabila populasi lebih dari 100 maka sampel yang diambil menggunakan rumus, tetapi apabila populasi kurang dari 100 maka sample yang diambil adalah dari seluruh populasi tersebut. Maka sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 57 orang.

3.5. Skala Pengukuran Data

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Maka dalam penelitian ini, hanya digunakan empat kategori diantaranya :

Tabel 3.2
Klasifikasi Alat Ukur

Klasifikasi	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
KS	Kurang Setuju	2
TS	Tidak Setuju	1

3.6. Uji Kualitas Data

3.6.1 Uji Realibitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah metode *Alpha Cronbach*. Metode *Alpha Cronbach* yang digunakan untuk menghitung reabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan ‘benar atau salah’ maupun ‘ya atau tidak, melainkan digunakan untuk menghitung reabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan *reliable* dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas $> 0,6$ (Siregar, Syofian. : 57).

3.6.2 Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (*a valid measure if it succesfully measure the phenomenon*). Analisis faktor dilakukan dengan mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid (Sugiyono, 2016: 125-126).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7. Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Pengujian dilakukan dengan melihat penyebab data (titik) pada suhu diagonal dari grafik sketer plot, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8. Uji Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2013), uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel *independen* dan satu variabe *dependen*, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh).

Persamaan dari regresi linear sederhana adalah:

$$y = a + bx + e$$

Keterangan:

y = Kinerja (Variabel *dependen*)

a = Bilangan konstanta

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

x = *Good Governance* (Variabel *independen*)

e = Tingkat kesalahan (*error*)

3.9. Uji Hipotesis

3.9.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji T yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel independen X: *Good Governance* secara parsial atau individual terhadap variabel dependen Y : Kinerja ASN. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ Sig $< \alpha$ maka : H_0 ditolak, H_a diterima, artinya terdapat pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja ASN.
- 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ Sig $> \alpha$ maka : H_0 diterima, H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja ASN.

3.10. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) dimaksud untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinan (R^2) antara 0 – 1. Jika koefisien dterminan 0 berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila koefisien determinan semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, karena variabel independen pada lebih dari 2, maka koefisien determinan yang digunakan adalah Adjusted R Square. Dari determinan (R^2) ini dapat diperoleh nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan riau adalah sebuah provinsi di indonesia yang berbatasan dengan vietnam dan kamboja di sebelah utara, malaysia dan provinsi kalimantan barat di timur, provinsi kepulauan bangka belitung dan jambi di selatan, dan negara singapura, malaysia dan provinsi riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di indonesia. Secara keseluruhan wilayah kepulauan riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan dan desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama dan berpenduduk.

Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% daratan. Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Setelah lama bergabung dengan Riau, Kepulauan Riau akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR). Perjuangan BP3KR akhirnya membuahkan hasil dengan pemekaran provinsi Kepulauan Riau dari Riau pada tanggal 24 September 2002. Dengan motto berpangang amanah, bersauh marwah, provinsi kepulauan riau bertekad untuk

membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.

4.2. Geografis Provinsi Kepulauan Riau

4.2.1 Keadaan Alam

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Titik tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang terdapat di pulau Lingga. Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu:

1. Kabupaten Bintan ibukota Bintan Bunyu
2. Kabupaten Karimun dengan ibukota Tanjung Balai Karimun
3. Kabupaten Natuna dengan ibukota Ranai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kabupaten Lingga dengan ibukota Daik
5. Kota Tanjungpinang dengan ibukota Tanjungpinang
6. Kota Batam dengan ibukota Batam
7. Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ibukota Tarempa

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008. Dilihat dari sebaran wilayahnya, sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dikelilingi oleh laut dan daratannya terdiri dari banyak gugusan pulau.

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.
2. Sebelah selatan: Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
3. Sebelah barat :Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
4. Sebelah timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat

Topografi Kepulauan Riau adalah terdiri dari pesisir dan dataran tinggi, wilayah dengan variasi topografi tertinggi adalah Kabupaten Lingga dan yang relatif datar adalah Kota Tanjungpinang.

4.2.2 Aksesibilitas

Provinsi Kepulauan Riau dapat di jangkau melalui transportasi udara maupun transportasi laut. Bandara Hang nadim di Batam dan Bandara Raja Haji



Fasilitas di Tanjungpinang merupakan gerbang udara dari akses nasional maupun internasional. Selain itu pelabuhan pelabuhan yang tersebar di setiap Kabupaten kota menjadi pintu masuk di propinsi Kepri melalui laut Pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Riau terletak pulau Dompak. Aksesibilitas Dari pusat pemerintahan Kabupaten / kota ke pusat pemerintahan propinsi adalah sebagai berikut:

1. Dari pusat pemerintahan kota Tanjung Pinang di Senggarang dapat dicapai melalui angkutan darat dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.
2. Dari pusat pemerintahan Kota Batam dapat dicapai melalui angkutan laut dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.
3. Dari pusat pemerintahan Kabupaten Bintan dapat dicapai melalui angkutan darat dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.
4. Dari pusat Pemerintahan kabupaten Karimun dapat dicapai melalui angkutan laut dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam.
5. Dari pusat pemerintahan Kabupaten Lingga dapat dicapai melalui angkutan laut dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam dan angkutan udara dengan waktu tempuh setengah jam.
6. Dari pusat pemerintahan Kabupaten Natuna dapat dicapai melalui angkutan laut dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam dan angkutan udara dengan waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam sampai dengan dua jam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Dari pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dicapai melalui angkutan laut dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam dan angkutan udara dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam.

4.3. Sumber Daya Provinsi Kepulauan Riau

4.3.1 Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari, dengan prioritas kawasan yaitu: Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu, Natuna Bagian Selatan (Selat Lampa) tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi, Natuna Bagian Utara (Teluk Buton) tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek, Natuna Bagian Timur tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna Bagian Timur Laut tepatnya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai, tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Profil Singkat Biro Humas Protokoler Provinsi Kepulauan Riau

Biro Humas Protokoler Provinsi Kepulauan Riau terletak di Jl Komplek Perkantoran Gubernur Gedung A, Dompok, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Biro Humas Protokoler mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, penghubung dan kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Humas, Protokoler mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang humas dan dokumentasi, protokoler
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian kehumasan, keprotokolan, penghubung dan kerjasama.
3. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kehumasan, keprotokolan, penghubung dan kerjasama.
4. Pelaksanaan administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan.
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan, keprotokolan, penghubung dan kerjasama
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang kehumasan, keprotokolan, penghubung dan kerjasama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengkoordinasian kerjasama dengan instansi lain dibidang kehumasan, keprotokolan, penghubung dan kerjasama.
8. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh asisten.
Biro Humas, Protokol dan Penghubung membawahi Bagian Humas dan

Dokumentasi terdiri dari:

1. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi Publikasi.
2. Sub Bagian Publikasi.
3. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Protokol terdiri dari:

1. Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu.
2. Sub Bagian Protokol Pimpinan.
3. Sub Bagian Penyiapan Materi dan Naskah Sambutan.

Bagian Penghubung dan Kerjasama terdiri dari:

1. Sub Bagian Penghubung;
2. Sub Bagian Prasarana Penghubung; dan
3. Sub Bagian Kerjasama.
4. Jabatan Fungsional

4.5. Visi dan Misi Biro Humas Protokoler Provinsi Kepulauan Riau

4.5.1 Visi

“Terwujudnya kepulauan riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.5.2 Misi

1. Mengembangkan peri kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

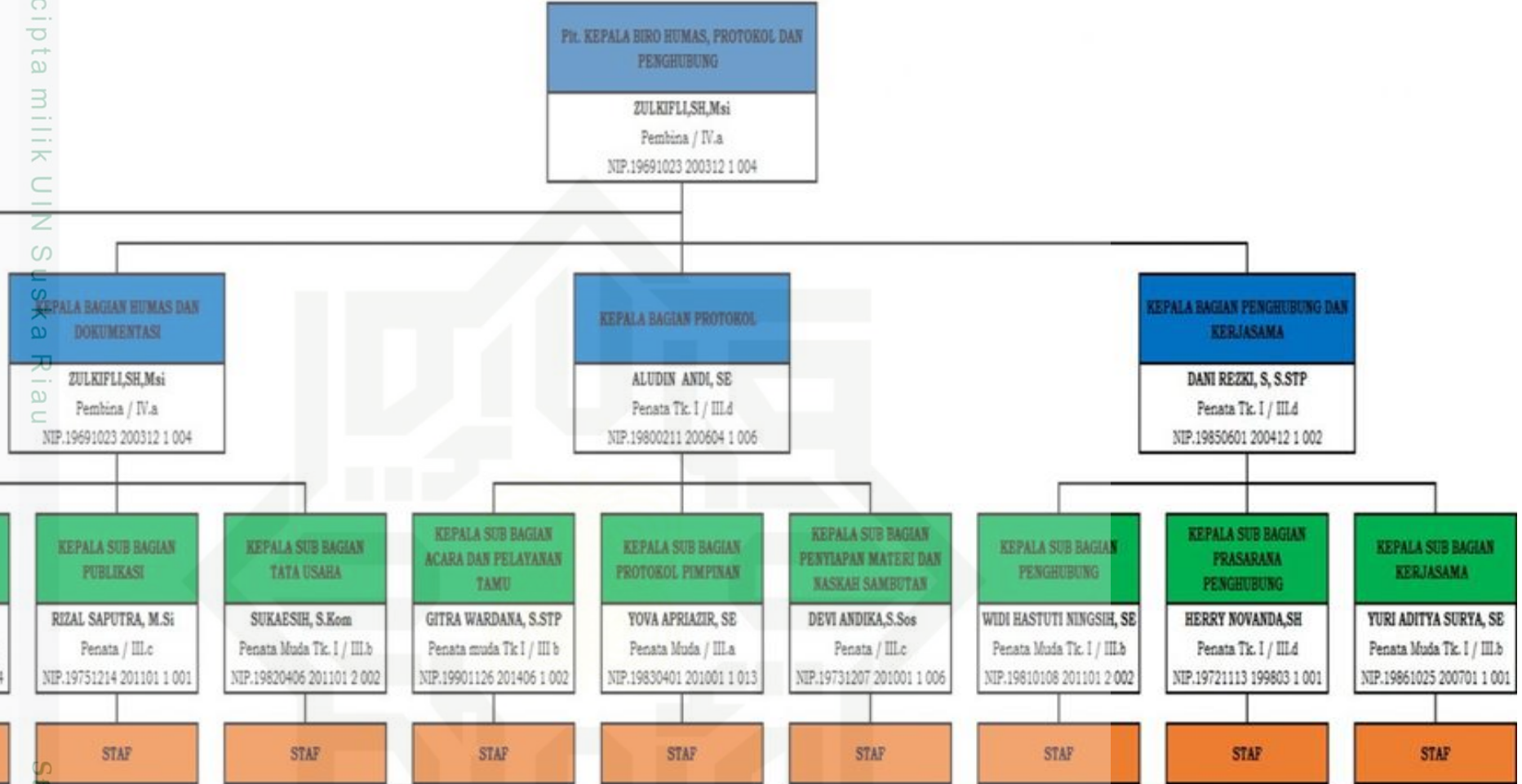
**STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN PENGHUBUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVONSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2019**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

State Islamic U



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi linear sederhana diperoleh bahwa pelaksanaan *good governance* memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja ASN pada biro humas protokoler kantor gubernur provinsi kepulauan riau.
2. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,437 hal ini menunjukkan bahwa variabel *Good Governance* memberikan pengaruh sebesar 43,7% terhadap Kinerja ASN. Sedangkan sisanya sebesar 0,563 atau 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau supaya tetap mempertahankan pelaksanaan *good governance* dan kinerja ASN dengan baik. Adapun saran tersebut:

1. Melaksanakan program-program dengan baik yang akan meningkatkan kinerja tetap berjalan dengan baik.
2. Terus berusaha dengan semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja yang baik supaya instansi dapat menciptakan perubahan dari waktu ke waktu menjadi lebih baik.



3. Untuk lebih meningkatkan mutu ASN di Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau maka pimpinan harus melakukan strategi pengembangan baik itu dengan cara pendidikan dan pelatihan, loka karya dll. Sehingga para ASN di Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki mutu pelayanan yang lebih profesionalisme.
4. Pimpinan instansi harus lebih menegakkan rasa disiplin dan penegakan hukum, dimana agar para ASN Biro Humas Protokoler Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih agar kinerja dalam instansi yang ada dapat lebih ditingkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dharma. 2004. *Manajemen Supervisi*. Rajawali Press: Jakarta
- Bilson, Simamora. 2004. *Riset Pemasaran*. Gramedia Utama : Jakarta
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM buku 1*. Indeks:Jakarta
- Dwiyanto Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gibson, JL.1997. *Organisasi dan Manajemen*. Penerbit Erlangga:Jakarta
- Gomes, Faustino Cardoso, Dr. 2003. *MSDM*. Andi :Yogyakarta
- Kansil, C.S.T.2001.*Pemerintah Daerah di Indonesia*.Sinar Grafika:Jakarta
- Manan Bagir, 1992. *Dasar Dasar Perundangan Indonesia*. INHILCO: Jakarta.
- Mc Kenna, Eugene & Nic Beech. 2000. *The Essence Manajemen Sumber Daya Manusia..* Penerbit Anda: Yogyakarta
- Marbun, SF dkk.2001.*Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*.UII Pers:Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.ANDI Offset: Yogyakarta
- Nur Azlina. 2014. *Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Vol 3 No 1
- Nisjar S, Karhi. 1997.*Beberapa Catatan Tentang "Good Governance"*. JurnalAdministrasi dan Pembangunan. Vol. 1, No.2. Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia: Jakarta
- Ruky, Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Index: Jakarta.
- Situmorang Victor M. dan Sitanggang, Cormentyna.1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika
- Siagian, Sondang. 2002. *Manajemen SDM*. Bumi Aksara Jakarta
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintah yang baik) Bagian kedua*. CV Mandar Maju: Bandung.

Setiawan,Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offse: Bandung

Thomas S. Khaitu. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Vol 5 No 3

W. Kumorotomo. 2009. *Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*".Gava Media:Yogyakarta

Widodo, Joko. 2001. *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Insan Cendekia: Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran

Pengantar

Dalam rangka penyusunan skripsi, saya bermaksud untuk mengetahui tentang Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Kinerja ASN Pada Bagian Biro Humas Protokoler Di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul penelitian saya, dan untuk mencapai tujuan ini saya mengharapkan kesediaan Bapak/ibu untuk bekerjasama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya sesuai dengan tingkat pengalaman Bapak/ibu. Atas kesediaan anda saya ucapkan terima kasih.

Penjelasan dan petunjuk pengisian angket

1. Angket atau soal ini diajukan dalam rangka pembuatan skripsi
2. Jawaban Bapak/ibu tidak akan mempengaruhi Bapak/ibu di Lingkungan kerja maupun dalam kehidupan Bapak/ibu
3. Jawaban Bapak/ibu adalah rahasia dan orang lain tidak mengetahuinya
4. Dibawah ini disediakan beberapa pertanyaan / pernyataan terkait masalah penelitian yang sedang diteliti. Untuk pertanyaan di bawah ini adalah pertanyaan tertutup
5. Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang tersedia

Identitas Responden

- Nama** :
- Umur** :.....**Tahun**
- Jenis Kelamin** : **Laki-laki** **Perempuan**
- Lama bekerja di Instansi** :
- Status Pegawai** :
- Pangkat / Golongan** :

Pilihan jawaban angket terdiri dari :

- Sangat Setuju (SS)** : Dengan bobot skor 4
- Setuju (S)** : Dengan bobot skor 3
- Kurang Setuju (KS)** : Dengan bobot skor 2
- Tidak Setuju (TS)** : Dengan bobot skor 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indikator 1. Variabel X (Good Governance) Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
		4	3	2	1
1.	Sudah mengetahui secara jelas tugas, fungsi dan wewenang sebagai ASN di Biro Humas Protokoler Provinsi Kepulauan Riau.				
2.	Berinisiatif menyusun laporan akuntabilitas kerja di setiap akhir tahun.				
3	Setiap tugas dan kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dapat dipertanggungjawabkan.				
4	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah				
5	Sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan baik				

Indikator 2. Transparansi

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
		4	3	2	1
1.	Sistem komunikasi organisasi di Biro Humas Protokoler sudah terbuka.				
2	Menerapkan prinsip – prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan				
3	Prinsip good governanance harus dipenuhi demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan sehat				
4	Transparansi dan partisipasi masyarakat harus ada di setiap penyelenggara pemerintahan.				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indikator 3. Efisiensi dan Efektivitas

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
		4	3	2	1
1.	Mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus yang diminta secara mendadak.				
2.	Pekerjaan yang diselesaikan selalu mencapai sasaran yang ditetapkan.				
3.	Sering meminta bantuan kepada rekan kerja apabila tugas yang diberikan sulit.				
4.	Mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari solusi terhadap tugas ataupun masalah pekerjaan yang sedang dihadapi.				

Kinerja (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
		4	3	2	1
1.	Selalu merasa puas setelah melakukan suatu pekerjaan.				
2.	Selalu merasa senang dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan.				
3.	Pekerjaan /tugas yang diberikan atasan sudah sesuai dengan kemampuan.				
4.	Mampu bekerja secara profesional				
5.	Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan sesuai deadline.				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator 5. Responsiveness

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
		4	3	2	1
1.	Aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.				
2.	Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan.				
3.	Aspirasi masyarakat sangatlah penting untuk didengar dan di tindak lanjuti.				

Indikator 6. Strategig Vision (Adanya visi kedepan)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
		4	3	2	1
1.	Berkembang dalam menciptakan perubahan kearah yang lebih baik.				
2.	Menciptakan perubahan dari waktu ke waktu agar instansi menjadi lebih baik.				
3.	Belajar dari kesalahan sebelumnya dan mengembangkan asprasi masing-masing pegawai.				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



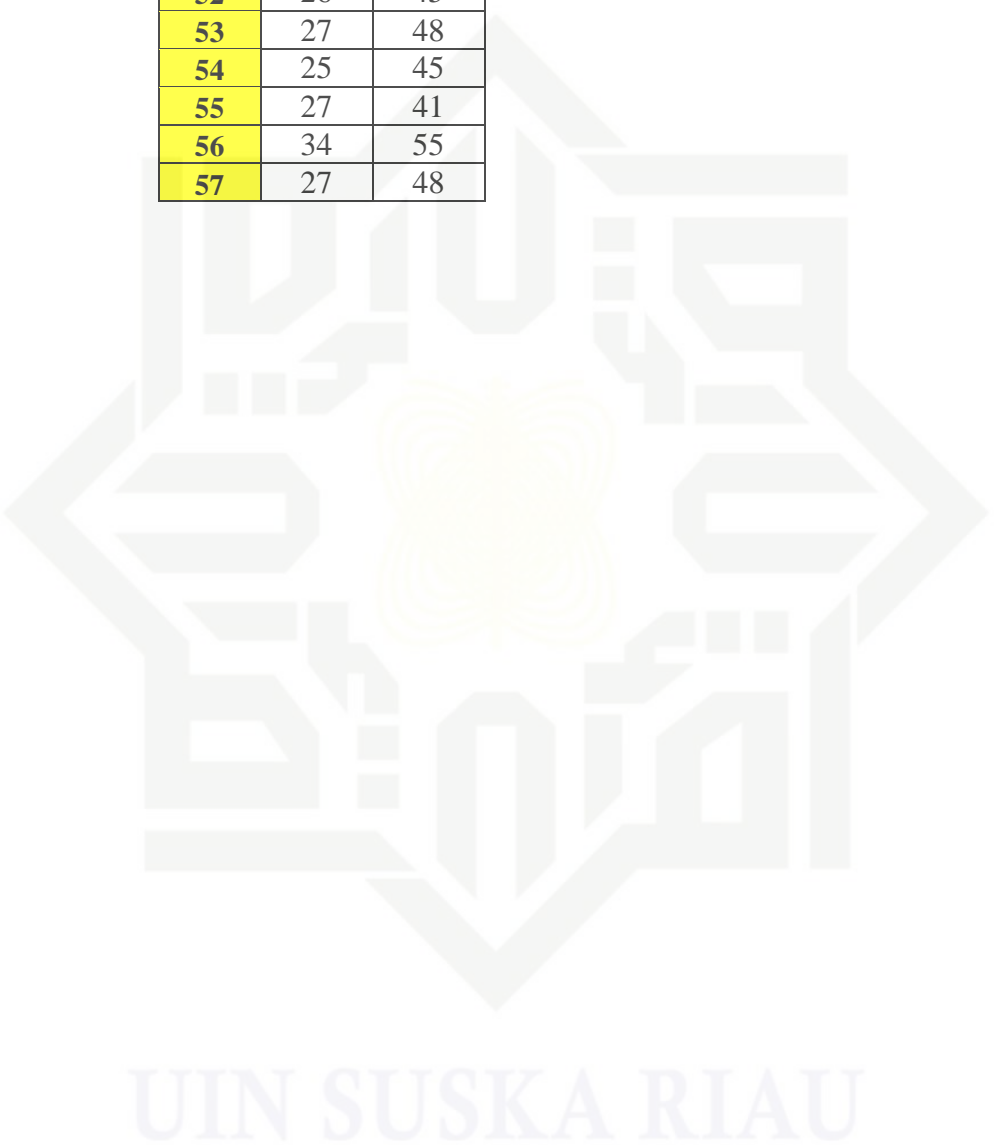
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

30	3	3	3	2	3	3	4	3	3	27	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	48
31	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	4	4	3	46
32	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	54
33	3	3	2	2	3	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	46
34	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
35	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	47
36	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
37	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
38	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
39	3	3	3	2	3	3	4	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	40
40	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
41	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	44
42	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	55
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
44	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	47
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	4	3	46
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	40
48	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	59
49	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	43
50	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
51	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	47
52	4	3	3	2	2	3	3	3	3	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48
54	3	3	3	2	2	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	41
56	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	55
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Y	X1
1	29	48
2	28	45
3	29	48
4	31	56
5	29	45
6	26	45
7	29	50
8	28	45
9	23	48
10	26	49
11	32	47
12	26	44
13	24	43
14	27	46
15	27	51
16	28	47
17	34	58
18	21	44
19	28	56
20	23	43
21	32	54
22	28	50
23	34	57
24	21	42
25	32	50
26	24	52
27	24	46
28	29	53
29	22	46
30	27	48
31	28	46
32	34	54
33	25	46
34	29	48
35	22	47
36	28	48
37	28	48
38	22	48
39	27	40
40	28	48
41	22	44
42	34	55
43	27	48
44	22	47



45	27	46
46	27	48
47	27	40
48	34	59
49	28	43
50	25	48
51	25	47
52	26	45
53	27	48
54	25	45
55	27	41
56	34	55
57	27	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran : Tabel Frekuensi

A. Variabel Pelaksanaan Good Governance (X)

X.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	46	80.7	80.7	80.7
4.00	11	19.3	19.3	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	46	80.7	80.7	80.7
4.00	11	19.3	19.3	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	42	73.7	73.7	73.7
4.00	15	26.3	26.3	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	3.5	3.5	3.5
3.00	47	82.5	82.5	86.0
4.00	8	14.0	14.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.8	1.8	1.8
3.00	42	73.7	73.7	75.4
4.00	14	24.6	24.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	41	71.9	71.9	71.9
4.00	16	28.1	28.1	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	47	82.5	82.5
	4.00	10	17.5	100.0
	Total	57	100.0	100.0

X.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	10.5	10.5
	3.00	43	75.4	86.0
	4.00	8	14.0	100.0
	Total	57	100.0	100.0

X.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	17.5	17.5
	3.00	42	73.7	91.2
	4.00	5	8.8	100.0
	Total	57	100.0	100.0

X.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	51	89.5	89.5
	4.00	6	10.5	100.0
	Total	57	100.0	100.0

X.11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	14	24.6	24.6
	3.00	42	73.7	98.2
	4.00	1	1.8	100.0
	Total	57	100.0	100.0

X.12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.3	5.3
	3.00	16	28.1	33.3
	4.00	38	66.7	100.0
	Total	57	100.0	100.0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X.13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	7.0	7.0	7.0
3.00	22	38.6	38.6	45.6
4.00	31	54.4	54.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	3	5.3	5.3	5.3
3.00	20	35.1	35.1	40.4
4.00	34	59.6	59.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

X.15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	51	89.5	89.5	89.5
4.00	6	10.5	10.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

B. Variabel Kinerja ASN (Y)

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	7	12.3	12.3	12.3
3.00	30	52.6	52.6	64.9
4.00	20	35.1	35.1	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	9	15.8	15.8	15.8
3.00	40	70.2	70.2	86.0
4.00	8	14.0	14.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	18	31.6	31.6	31.6
3.00	31	54.4	54.4	86.0
4.00	8	14.0	14.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	19	33.3	33.3	33.3
3.00	38	66.7	66.7	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	14	24.6	24.6	24.6
3.00	43	75.4	75.4	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	49	86.0	86.0	86.0
4.00	8	14.0	14.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	3	5.3	5.3	5.3
3.00	24	42.1	42.1	47.4
4.00	30	52.6	52.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	49	86.0	86.0	86.0
4.00	8	14.0	14.0	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Y.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	7.0	7.0	7.0
3.00	44	77.2	77.2	84.2
4.00	9	15.8	15.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

Lampiran

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

A. Variabel Pelaksanaan Good Governance (X)

Case Processing Summary

	N	%
Valid	57	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.902	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	44.8070	17.230	.585	.882
X.2	44.8070	16.801	.724	.878
X.3	44.7368	16.626	.690	.878
X.4	44.8947	17.774	.400	.889
X.5	44.7719	16.536	.682	.878
X.6	44.7193	16.348	.755	.875
X.7	44.8246	17.004	.686	.879
X.8	44.9649	16.784	.560	.883
X.9	45.0877	16.867	.524	.885
X.10	44.8947	17.524	.656	.882
X.11	45.2281	17.429	.433	.888
X.12	44.3860	16.527	.510	.887
X.13	44.5263	16.504	.473	.889
X.14	44.4561	16.538	.497	.887
X.15	44.8947	17.953	.485	.887

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Variabel Kinerja ASN (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.905	.911	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	24.0702	9.209	.674	.897
Y.2	24.3158	9.220	.836	.882
Y.3	24.4737	8.718	.816	.884
Y.4	24.6316	10.094	.662	.895
Y.5	24.5439	10.574	.552	.903
Y.6	24.1579	10.671	.667	.898
Y.7	23.8246	9.540	.652	.897
Y.8	24.1579	10.671	.667	.898
Y.9	24.2105	9.955	.716	.892

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

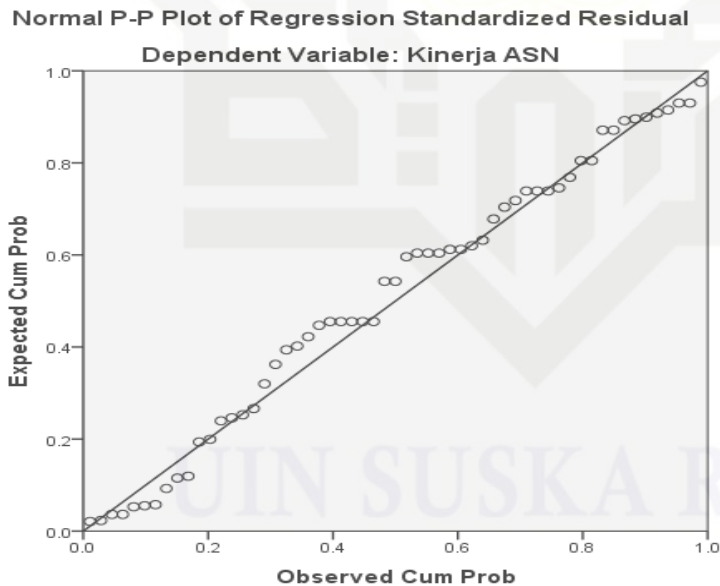
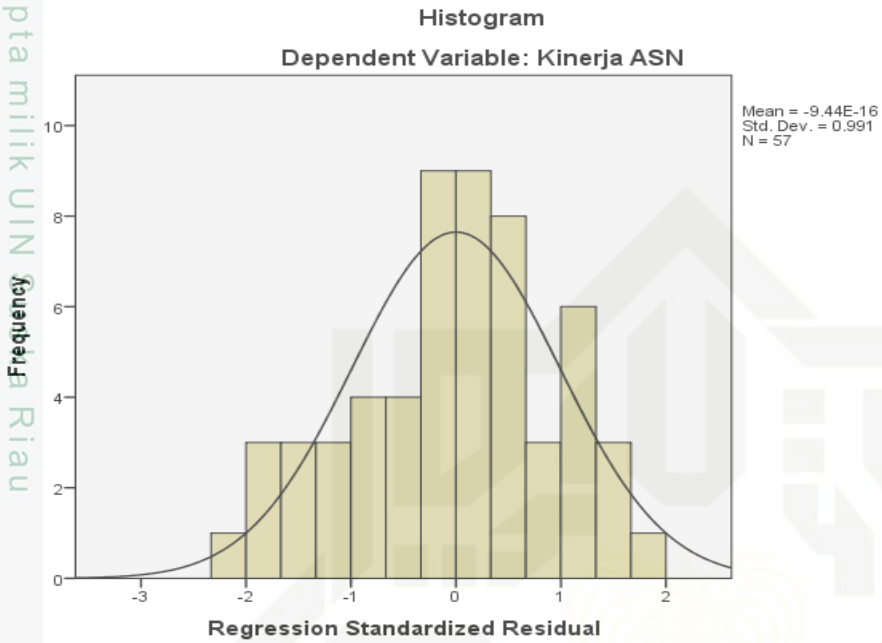
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran : Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas Data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.63424573
	Absolute	.088
Most Extreme Differences	Positive	.067
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.768

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran: Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.967	3.895		.505	.615
	Pelaksanaan Good Governance	.528	.081	.661	6.531	.000

a. Dependent Variable: Kinerja ASN

Lampiran : Uji Hipotesis

a. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.967	3.895		.505	.615
	Pelaksanaan Good Governance	.528	.081	.661	6.531	.000

a. Dependent Variable: Kinerja ASN

Lampiran: Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	.437	.427	2.658

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja ASN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran: Tabel T Statis

Titik Persentase Distribusi (df = 41 –80)

Df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41		0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42		0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43		0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44		0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45		0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46		0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47		0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48		0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49		0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50		0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51		0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52		0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53		0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54		0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55		0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56		0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57		0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58		0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59		0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60		0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61		0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62		0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63		0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64		0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65		0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66		0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67		0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68		0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69		0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70		0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71		0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72		0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73		0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74		0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75		0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76		0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77		0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78		0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79		0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80		0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Membagikan kuesioner bersama salah satu ASN



Membagikan kuesioner bersama salah satu ASN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3350/2020 Pekanbaru, 10 September 2020 M
 Sifat : Biasa 22 Muharram 1442 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

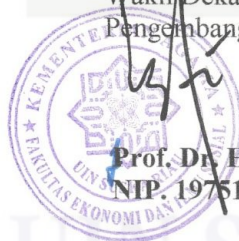
Kepada
 Yth. **Drs. H. Almasri, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nurrijaliana
 NIM : 11675201750
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja ASN Pada Bagian Biro Humas Protokoler di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3230/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Agustus 2020 M
8 Muharram 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurrijaliana
NIM. : 11675201750
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja ASN pada
Bagian Biro Humas Protokoler di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Gubernur Kepri Gedung B1 Lantai 1 & 2, Pulau Dompok
TANJUNGPINANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



Nomor : 0484/2n.1/DPMPTSP/2020

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 41).

Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3230/2020

Dasar

Menimbang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama / Obyek :

b. Nim/ Perguruan Tinggi/Jurusan/jenjang :

c. Untuk

: Nurrijaliana
 : 11675201750 / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau / Administrasi Negara / Pendidikan Strata-1
 : Melakukan Penelitian, dengan judul "**Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja ASN Pada Bagian Biro Humas Protokoler di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau**"

Lokasi Penelitian :

1. Provinsi Kepulauan Riau

Waktu/Lama Penelitian :

Selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat,

Sebelum Melakukan Penelitian, agar melapor kepada Pemerintah Setempat

Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah Setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Tanjungpinang, 23 Sep 2020

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Drs. Syamsuardi, MM

Pembina Utama Madya / IVd

NIP. 19630105 199003 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi kepulauan Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagai atasan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Pulau Dompok - Tanjungpinang – Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
E-mail: setdakepri@yahoo.com Website: www.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/843/B.HPP/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKAESIH, S.Kom., MM**
 NIP : **19820406 201101 2 002**
 Pangkat / Gol. Ruang : **Penata / III.c**
 Jabatan : **Kasubbag Tata Usaha Biro Humas, Protokol dan
 Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
 Riau**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURRIJALIANA**
 NIM : **11675201750**
 Program Studi : **Administrasi Negara**
 Universitas : **Uin Suska Riau**
 Maksud : **Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Biro Humas, Protokol dan Penghubung Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan judul Tugas Akhir "PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ASN PADA BAGIAN BIRO HUMAS PROTOKOLER DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU".**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Tanjungpinang, 19 Oktober 2020

a.n **KEPALA BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN PENGHUBUNG
 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 Kasubbag Tata Usaha**



SUKAESIH, S.Kom., MM
 Penata / III.c

NIP. 19820406 201101 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kipta Diindungi Uin Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurrijaliana putri pertama dari Bapak Rijal Hamdani dan Ibu Noviar yang lahir pada tanggal 20 Agustus di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Penulis mulai menempuh Pendidikan pada tahun 2004 pada jenjang Sekolah Dasar Negeri 012 Tanjungpinang Timur dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Tanjungpinang, dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di SMA Negeri 2 Tanjungpinang dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Strata Satu (S1), Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN Suska Riau. Pada tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 penulis melaksanakan PKL di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Pada tanggal 8 Juli sampai dengan 30 Agustus tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan niat tekad dan motivasi yang tinggi penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas terselesainya skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Kinerja ASN Pada Bagian Biro Humas Protokoler Di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau”.